

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya data pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja perekonomian, sedangkan jika pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan kinerja perekonomian.

Usaha untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan ekonomi perlu adanya suatu rencana bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Maka dari itu, dengan adanya rencana upaya pembangunan daerah dalam mengembangkan

potensi daerah tersebut untuk mencapai keseimbangan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi).

Pertumbuhan ekonomi biasanya lebih menunjukkan perubahan yang bersifat kuantitatif yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan biasanya diukur dengan PDRB atau pendapatan perkapita, serta dapat diukur dari sisi masyarakat seperti masyarakat merasakan kepuasan, kenyamanan, merasa aman dan tentram serta merasakan kebahagiaan.

Sebagaimana pandangan ekonomi Islam menyatakan bahwa Islam memandang pentingnya pemerataan distribusi kekayaan, karena pertumbuhan ekonomi dalam Islam menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di daerah tersebut. Untuk mencapai stabilitas perekonomian dan memacu serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, maka melalui kebijakan fiskal pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengatur keuangannya melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi di daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah, mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerahnya.¹

¹ Arini & Made Dwi Setyadi Mustika, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dari tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Banten
Tahun 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	5.61
2016	5.51
2017	5.93
2018	6.07
2019	5.54

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dari tahun 2015-2019 terus menerus mengalami kenaikan. Tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019 karena sektor Industri yang menurun.

Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur suatu daerah juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini disebut pengeluaran pemerintah yang diukur dari total belanja langsung dan tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Secara umum gambaran pengeluaran publik yaitu infrastruktur dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran publik dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011² yang menyatakan bahwa struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dimana belanja langsung merupakan belanja yang anggaran terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai untuk upah/honorium, barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, <http://www.bpkp.go.id> di akses pada 08 Maret. 2021, Pukul 15.40 WIB.

belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program yang meliputi belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung dalam jenis belanja modal menjadi bagian penting karena kegiatan penganggaran yang memerlukan pengadaan infrastruktur dalam pelaksanaannya akan melibatkan penganggaran belanja modal. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Keseluruhan belanja modal tersebut merupakan infrastruktur yang disediakan oleh daerah.

Adanya ketersediaan infrastruktur penting bagi pemerintah untuk menarik minat investor masuk. Karena dengan terjadinya peningkatan investasi maka akan mendorong penciptaan masyarakat yang sejahtera seperti dengan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Dengan kata lain yaitu pemerintah harus

seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali sumber dana potensial yang ada di daerahnya. Karena pengalokasian dana untuk setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan daerahnya masing-masing.

Sering kali permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu penerimaan atau pendapatan yang tidak mampu menopang seluruh belanja atau pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bisa jadi APBD gagal ketika tidak bisa lagi membiaya pembangunan disuatu daerahnya. Misalnya anggaran yang ada hanya mampu untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta biaya operasional.³

Hal tersebut dapat kita lihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten / Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

³ Humaidah Muafiqie, *Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Implikasinya Terhadap Distribusi Pendapatan Di Jawa Timur*, (Jurnal Eba Edisi I, Vol. 2 No.1. 2015) h. 101

Tabel 1. 2
Belanja Langsung (Ribu Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	686.816,137	761.022,701	1.104.466,828	901.022,218	963.528,417
Kab. Lebak	922.049,631	1.056.280,694	1.064.593,179	1.009.340,106	1.169.097,012
Kab. Tangerang	2.690.613,123	2.850.907,038	3.197.178,146	3.680.162,135	3.314.823,386
Kab. Serang	1.014.655,223	1.144.476,358	1.343.992,374	1.505.236,657	1.565.838,344
Kota Tangerang	2.021.582,651	2.311.517,581	2.602.498,455	2.856.555,608	5.614.704,347
Kota Cilegon	835.355,623	989.681,050	1.129.364,066	942.805,321	1.086.384,918
Kota Serang	552.935,681	547.253,625	799.456,478	111.102	752.676,622
Kota Tangsel	1.917.595,503	2.164.551,514	2.328.805,494	2.376.221,899	3.137.941,010
Provinsi Banten	3.325.176,946	3.089.817,728	3.149.081,253	3.503.107,943	4.018.507,859

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran Belanja Langsung di Provinsi Banten yang paling banyak yaitu terjadi pada tahun 2019 sebanyak Rp 4.018.507,859. Dan dapat dilihat pula Kabupaten/Kota yang paling banyak pengeluaran untuk Belanja Langsung yaitu terdapat pada Kota Tangerang sebanyak Rp 5.614.704.347 Kota Tangerang memperoleh angka pengeluaran belanja paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten.

Tabel 1. 3
Belanja Tidak Langsung (dalam Ribu Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	1.350.212,296	1.454.337,836	1.433.394,244	1.555.822,014	1.632.381,162
Kab. Lebak	1.170.645,428	1.378.295,138	1.416.765,577	1.437.465,508	1.489.189,123
Kab. Tangerang	1.488.456,779	1.684.422,209	1.784.640,918	2.198.672,942	2.428.784,429
Kab. Serang	1.327.565,668	1.399.140,531	1.398.004,480	1.492.867,052	1.637.891,506
Kota Tangerang	1.079.451,915	1.385.892,634	1.923.552,589	1.431.451,915	1.490.076,362
Kota Cilegon	628.622,018	623.667,866	628.791,008	647.281,764	736.923,193
Kota Serang	508.2,112	555.587,703	531.032,474	1.227.871,713	582.739,487
Kota Tangsel	703.644,742	724.333,735	638.827,814	895.220,101	936.840,539
Provinsi Banten	4.758.963,213	5.835.995,714	6.363.731,866	6.489.711,468	7.306.080,243

Sumber : BPS Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran Belanja Tidak Langsung di Provinsi Banten yang paling banyak yaitu terjadi pada tahun 2019 sebanyak Rp 7.306.080,243, dan dapat dilihat pula Kabupaten/Kota yang paling banyak pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung yaitu terdapat pada Kabupaten Tangerang sebanyak Rp 2.428.784,429. Kabupaten Tangerang memperoleh angka pengeluaran belanja paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten.

Dari kedua tabel diatas menunjukkan perbandingan belanja langsung dan tidak langsung di Provinsi Banten dimana belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung. Hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan karena seharusnya porsi untuk belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat ikut secara langsung dalam mendorong percepatan pembangunan, yaitu dengan menganggarkan belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Alokasi belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung didasarkan pada kebutuhan daerah melalui prioritas anggaran dan pelayanan publik untuk memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran

daerah dengan baik, yaitu dengan dialokasikan secara efisien dan efektif.

Pada penelitian sebelumnya, bahasan studi tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudara Felix Farel Maga dkk(2016) membuktikan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan judul **“Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2015-2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi pengeluaran untuk Belanja Langsung Lebih kecil dibandingkan Belanja Tidak Langsung
2. Pengeluaran untuk Belanja Tidak Langsung idealnya lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Langsung
3. Belanja modal yang merupakan jenis Belanja Langsung lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa.
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah agar penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga tidak menyimpang dari sasaran pokok yang akan dibahas, pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Fokus penelitian variabel bebas yang digunakan adalah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
2. Fokus penelitian Variabel Terikat yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi.

3. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2015-2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019?
2. Apakah Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019?
3. Apakah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah Belanja Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui Apakah Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2019
3. Untuk mengetahui Apakah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2015-2019

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta memudahkan pembaca untuk mencari referensi dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, diharapkan peneliti ini dapat menjadi semangat untuk terus belajar dan menambah pengalaman dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi Provinsi Banten serta penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang pengeluaran pemerintah baik Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta sebagai ajang ilmiah untuk penerapan berbagai teori selama masa perkuliahan.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk

memanfaatkan sumber dana dari pemerintah pusat agar digunakan secara efisien dan efektif serta dikelola secara transparansi dan akuntabel sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama merupakan pendahuluan, penulis menjadikan tolak ukur dalam langkah-langkah penelitian. Pada bab ini akan membahas langkah awal dalam menyusun skripsi, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab kedua merupakan kajian pustaka untuk membahas teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menjelaskan tentang Desentralisasi Fiskal, Belanja Langsung,

Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ketiga ini merupakan metode penelitian yang akan membahas metode penulisan yang akan digunakan berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang akan menguraikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan. Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik yang meliputi belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, hasil regresi, pengujian hipotesis secara statistik, serta pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab kelima sebagai bab terakhir dari kesimpulan ini akan diuraikan kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan hasil peneliti.